

Pengaruh Pemberitaan Pemberhentian Pegawai terhadap Citra Komisi Pemberantasan Korupsi

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v5i1.192>

Tessa Mahardhika Sugiarto¹, Poppy Ruliana¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi
Jl. Wijaya II, No 62 Jakarta 12160, Indonesia
e-mail korespondensi: tessa.sugiarto@kpk.go.id

Submitted: 19/10/2022, **Revised:** 21/11/2022, **Accepted:** 31/12/2022
Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract

The phenomenon of political disinformation accompanied by warnings of increasing negative attitudes towards social media platforms has sparked intense public attention. The dismissal of 57 KPK employees, which was officially announced by the Deputy Chair of the KPK, Alexander Marwata, at a press conference via the KPK RI YouTube channel on September 15, 2021, caused polemics and chaos in public opinion which had an impact on the process of forming the image of the KPK institution itself. The focus of the current study aims to explain the effect of reporting on the dismissal of 57 employees on the KPK YouTube platform on the image of the KPK institution. The theory used in this research is social media and image theory. Explanative quantitative approach with positivism paradigm as well as data collection techniques through Google Form, field observations, documentation, literature review and search for information and resources that are relevant to current research. The population in this study amounted to 96 students and to determine the number of samples used the Taro Yamane formula to obtain a total of 80 people who were used as respondents to the Institute for Legal Studies and Consultation, University of Muhammadiyah Jakarta. The sampling technique was carried out purposively. The data analysis technique used simple linear regression analysis to determine the yield of the proposed presumption hypothesis. The results of the study show that the news of the dismissal of 57 employees on the image of the KPK has quite an effect on the image of the KPK institution so that the theory used in this study is quite supportive.

Keywords: image; employees; news; social media; youtube

Abstrak

Fenomena disinformasi politik disertai dengan peringatan akan sikap negatif yang semakin meningkat terhadap platform media sosial telah memicu perhatian publik secara intens. Pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah resmi diumumkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers melalui channel YouTube KPK 15 September 2021 menimbulkan polemik serta kekisruhan opini publik yang berdampak pada proses pembentukan citra lembaga KPK. Fokus dari studi saat ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pemberitaan pemberhentian 57 pegawai pada platform YouTube KPK RI terhadap citra lembaga KPK. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah media sosial dan teori citra. Pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan paradigma positivisme serta teknik pengumpulan data melalui Google Form, observasi lapangan, dokumentasi, kajian pustaka dan pencarian informasi serta daya yang relevan digunakan dalam penelitian saat ini. Populasi penelitian berjumlah 96 dan untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane sehingga diperoleh jumlah 80 orang yang dijadikan responden Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui perolehan hasil hipotesis praduga yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan pemberhentian 57 pegawai terhadap Citra KPK cukup berpengaruh terhadap citra Lembaga KPK sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini cukup mendukung.

Kata Kunci: berita, citra, media sosial, pegawai, youtube

PENDAHULUAN

Perkembangan *platform* media sosial memiliki peranan khusus atas efektivitas publik dalam berinteraksi, mencari informasi, hiburan dan membangun kreativitas kemampuan dalam menyajikan sebuah konten *audio-visual* (Chano & Paramita, 2019). Peran serta misi *platform* media sosial dipahami sebagai salah satu tujuan komunikasi yang tepat atas produktivitas publik menyampaikan atau menerima sebuah pesan informasi berita yang telah dipersiapkan dengan cermat tanpa keterbatasan jarak dan waktu yang disesuaikan pada saluran media tertentu (R. E. Lundgren & McMakin, 2018)

Fenomena disinformasi politik disertai dengan peringatan akan sikap negatif yang semakin meningkat terhadap *platform* media sosial telah memicu perhatian publik secara intens atas perdebatan tentang kepercayaan menggunakan *platform* media sosial dalam menyampaikan sebuah berita pada beberapa tahun terakhir, mengingat peran penting media berita bagi masyarakat demokratis, memungkinkan mendesak untuk mempelajari lebih lanjut proses kompleks mengenai kepercayaan berbagai sumber berita *mainstream* maupun *non-mainstream*, sebagai upaya membangun persepsi publik mengenai citra transparan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi pada sebuah pemberitaan (Kohring, 2019).

Pada tahun 2019 telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 17 Oktober 2019, mengamanatkan adanya pengalihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut dikeluarkan. KPK sendiri didirikan pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 30/2002, sementara komisararis pertamanya dilantik pada Desember 2003 dan pertama kali menyelidiki kasus korupsi dan vonis pertama pada tahun 2005. Sejak saat itu KPK telah menghadapi ancaman dan tantangan berat dari politisi korup dan pejabat pemerintah (Umam & Head, 2020).

Pemberitaan pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi diumumkan Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui *channel* YouTube KPK pada 15 September 2021. Keberlangsungan atas pemberhentian pegawai KPK dalam wacana TWK melibatkan 1.351 pegawai, dengan perolehan 76 pegawai KPK tidak lulus atau dinonaktifkan. Dari 76 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus 24 pegawai diantaranya diberikan kebijakan untuk dibina ulang. Terdapat 18 pegawai tidak bersedia mengikuti pembinaan ulang. Dari 58 Pegawai yang tidak mengikuti pembinaan dan dinyatakan tidak lulus, terdapat satu pegawai memasuki masa pensiun, sehingga terdapat 57 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (Khatami & Kurnia, 2022).

Pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK kemudian menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat dan menjadi polemik tersendiri bagi pegawai KPK serta mengakibatkan kekisruhan opini publik (Rangkuti, 2021). TWK yang telah dilaksanakan oleh pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN telah melahirkan opini publik secara negatif. Perolehan hasil TWK kemudian melahirkan SK 652 dan KPK dianggap oleh sebagian kalangan tidak memiliki landasan hukum sebab secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pegawai KPK itu sendiri (Simamora & Nababan, 2021).

Polemik serta kekisruhan opini publik akibat pemberhentian 57 pegawai KPK didasari oleh pernyataan yang berseberangan dari Presiden Joko Widodo pada 17 Mei 2021 sebelum penetapan keputusan pemberhentian pegawai KPK. Presiden menyatakan jika TWK tidak dapat mendominasi keputusan atas pemberhentian 76 pegawai KPK. Selain itu, terdapat opini khusus yang telah tersebar luas atas dugaan maladministrasi dan berbagai argumentasi publik mengenai TWK tersebut (Rangkuti, 2021).

Pada konteks tersebut pegawai KPK menilai jika kebijakan proses TWK yang telah diselenggarakan BKN dianggap memiliki masalah tertentu, sehingga para pegawai melaporkan kegagalan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Usaha para pegawai KPK tersebut tidak membuahkan hasil sehingga keputusan penetapan pemberhentian dengan hormat (PDH) pada 57 pegawai KPK disahkan pada 30 September 2021 (Rosok et al., 2022).

Pemahaman publik dalam lingkup pemberitaan mengenai pemberhentian 57 pegawai KPK pada *platform channel* YouTube KPK berdampak pada proses pembentukan citra lembaga KPK. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan persepsi yang timbul dalam diri seseorang, maraknya fenomena

disinformasi politik mengenai pemberitaan pada *platform* media sosial serta banyaknya pesan bersifat ambigu dalam menengahi persoalan sedang dihadapi KPK (Umam & Head, 2020).

Perilaku publik menjadi tolak ukur terpenting dalam mengambil keputusan tepat dalam bermedia sosial pada sebuah pemberitaan, sebab hal yang memungkinkan publik terpengaruh oleh pesan yang disajikan pada sebuah pemberitaan, dipengaruhi oleh kesadaran dan faktor lingkungan publik (Ruben, 2017). Secara signifikan pemahaman atas perolehan pesan yang diterima publik mampu mempengaruhi pembentukan citra tanpa mengedepankan analisis sumber relevan, provokasi dan keberpihakan (Chandra, 2018). Dengan kata lain pandangan seseorang mengenai pembentukan citra memiliki sifat sensitif atas pemahaman publik dalam menerima informasi pada *platform* media sosial. Pemahaman publik mampu menghasilkan asumsi persepsi tersendiri dalam memperoleh proses pembentukan citra perusahaan, lembaga, pemerintahan maupun organisasi yang dihasilkan atas informasi atau berita yang disajikan (Carlina & Paramita, 2017).

Studi Kohring (2019) merupakan referensi utama dalam proses keberlangsungan penelitian saat ini. Pada studi tersebut berasumsi bahwa sebagian besar studi berurusan dengan konsekuensi internal dari kepercayaan media untuk sistem media itu sendiri, seperti eksposur dan ketergantungan yang berbeda dalam menggunakan *platform* media sosial. Namun, studi relevan dalam menganalisis perubahan hubungan antara media berita dan publiknya terhadap konsekuensi citra yang dihasilkan dari media untuk pemahaman bidang sosial lainnya seperti politik, pemerintahan dan budaya terbelakang rendah. Dalam konteks tersebut, penelitian saat ini memiliki sifat serupa mengenai hal relevan dalam menganalisis perubahan hubungan antara media berita dan publiknya terhadap konsekuensi citra yang dihasilkan dari media terhadap lembaga KPK yang identik dengan politik pada ranah lembaga antikorupsi negara.

Perolehan studi terkait pemahaman tentang gerakan *Save KPK* yang dilakukan (Suwana, 2020) mampu menjadi acuan atau referensi literatur studi pada proses penelitian saat ini. Studi tersebut memiliki temuan masalah berupa keinginan lebih dalam mengetahui didedikasikan pemberantasan korupsi Indonesia dan memberikan wawasan tentang motivasi para aktivis *Save KPK* secara digital yang secara tidak langsung mendukung gerakan politik pada *platform* media sosial. Temuan studi tersebut menyatakan jika citra positif KPK secara fundamental mempengaruhi kaum muda Indonesia untuk berpartisipasi dalam gerakan *Save KPK* dengan menggunakan *platform* media sosial.

Pada konteks persepsi publik terhadap citra lembaga KPK mengacu pada kajian Simamora & Nababan (2021), TWK merupakan langkah pihak KPK sebagai syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN seperti diatur dalam PP 41/2020 yang dikaji berdasarkan Pasal 3 huruf PP 41/2020 yang kemudian melahirkan SK 652. Namun terdapat permasalahan cukup signifikan dimana pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN merasa diperlakukan tidak adil, jika hak-hak para pegawai KPK untuk menjadi ASN telah "dirampas" melalui TWK dan mereka berhak mendapatkan kembali hak tersebut.

Dari perolehan referensi hasil studi tersebut, dapat disimpulkan cukup penting untuk dilakukan sebuah studi yang berhubungan dengan konteks lembaga KPK. Studi saat ini menitikberatkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikaitkan dengan citra KPK. Oleh sebab itu kunci permasalahannya adalah bagaimana menjelaskan pengaruh pemberitaan pemberhentian 57 pegawai pada *platform* YouTube KPK terhadap citra KPK? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberitaan pemberhentian 57 pegawai pada *platform* YouTube KPK RI terhadap citra KPK.

KERANGKA TEORI

Pemberitaan menurut Willard C. Bleyer (1998) dalam Suryawati (2011) merupakan peristiwa tertentu yang akan dipilih seorang jurnalis, kemudian dijabarkan melalui karya cetak maupun digital melalui media dengan tujuan memberikan informasi yang dikemas sedemikian rupa kepada publik. Efektivitas pemberitaan menurut William L. Rivers dalam (Effendy, 2009) tergantung pada konsep terstruktur dari topik yang dipublikasikan serta ide atau berita yang dihasilkan oleh wartawan yang disajikan melalui pendeskripsian pada konteks media tertentu.

Studi Baron (2005) beranggapan pemberitaan menjalankan kebijaksanaan atas kejadian tertentu berdasarkan laporannya. Publik secara individu dapat memutuskan mengkonsumsi pesan yang disampaikan atau tidak. Pada konteks tersebut sebuah pemberitaan dapat melayani kepentingan publik, meskipun individu sepenuhnya rasional dan skeptis terhadap laporan berita. Selain menyediakan informasi, pemberitaan memungkinkan mampu membuat argumen normatif mengenai eksternalitas

dengan tujuan mengubah pandangan publik mengenai berbagai macam informasi terkait bidang tertentu.

Terdapat berbagai aspek yang diperlukan dalam mengukur atau memahami pemberitaan pada *platform* media sosial sebagaimana penjelasan Hyer dan Covello (2005) dalam Lundgren & McMakin, (2018) berikut :

Background (Latar belakang). Pada konsep memahami pengaruh yang dihasilkan dari pemberitaan terhadap persepsi publik, pemahaman seseorang dari latar belakang berita yang disajikan sangat diperlukan. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan asumsi akhir seseorang dalam menerima pesan dan menghindari fenomena disinformasi sebuah pemberitaan. Konsep tersebut berfokus pada pemahaman seseorang dalam isi pesan yang disampaikan, keinginan publik dalam mencari sumber pesan atau menganalisis pesan yang akan diterima, membandingkan sumber informasi dengan informasi lainnya dan produktivitas seseorang dalam mencari informasi pada saluran media sosial.

Statement (Pernyataan). Untuk menghasilkan persepsi signifikan dalam diri publik, pernyataan yang diasumsikan dalam diri seseorang sangat perlu diketahui dan diperhatikan, sehingga perlu pendekatan lebih untuk mengetahui tanggapan seseorang atas pemberitaan yang disajikan pada sebuah media, dengan cara melakukan riset merangkuman pertanyaan mengenai tanggapan dari pesan yang diterima publik. Pada konsep ini komunikator menjadi penengah atas topik yang akan dibahas dan menghindari pemahaman serta pernyataan yang bersifat ambigu pada tiap pernyataan yang akan diberikan kepada publik selaku komunikan.

Verify the accuracy (Memverifikasi akurasi). Setelah melakukan tahapan dari proses *statement* atau pernyataan terhadap tanggapan pesan dari pernyataan yang diterima publik, memverifikasi keakuratan pernyataan diperlukan dalam mengetahui hasil signifikan dalam persepsi publik atas sebuah pemberitaan. Pada konsep ini, diperlukan sebuah pernyataan yang bersifat logis sehingga pernyataan tersebut mampu menepis atau memperkuat pernyataan sebelumnya, terkait konsep dari proses *statement* atau pernyataan. Konsep ini akan memperoleh identifikasi lebih signifikan pada persepsi sifat seseorang dalam pandangan logis terhadap pemberitaan seperti keberpihakan, pengaruh provokasi, opini budaya dan sebagainya.

Dari ketiga konsep tersebut mampu digunakan sebagai tolak ukur pemahaman publik dalam ranah pemberhentian 57 pegawai KPK terhadap pembentukan citra lembaga KPK atas pemberitaan pada *platform channel* YouTube KPK, sebab pemahaman individu terhadap pesan yang akan diterima dalam bidang informasi berita politik negara, diperlukan pengukuran secara intens sehingga mampu menghasilkan persepsi pandangan tertentu terhadap citra yang dihasilkan (Susanto, 2020)

Media Sosial

Menurut Nasrullah (2016) media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan para pengguna berinteraksi, merepresentasikan diri, berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara tidak langsung mampu membentuk ikatan sosial secara virtual. Pada konteks tersebut, media sosial merujuk pada makna bersosial dengan berbagai aspek berupa kegiatan komunikasi, pengenalan dan kerja sama. Pada dasarnya, media sosial mampu menarik perhatian pengguna untuk berpartisipasi dengan melakukan kontribusi memberikan informasi secara faktual, menyampaikan *feedback* atau aktif memberikan komentar dan berbagai hal yang berkaitan dengan interaksi antara sesama pengguna platform media sosial itu sendiri (Mangan et al., 2020).

Media sosial mampu membangun identitas dan realitas yang dikomunikasikan oleh para pengguna secara berbeda berdasarkan *platform* yang digunakan. Misalnya, penggunaan Twitter cenderung memanfaatkan media untuk mendapatkan serta berbagai informasi dan informalitas, penggunaan Instagram cenderung lebih ke arah presentasi diri dalam bergaya dan YouTube menjadi *platform* media sosial yang lebih dinamis dan mampu dimanfaatkan secara fleksibel (Boczkowski et al., 2018). YouTube sendiri, menjadi *platform* media sosial terbesar yang selalu digunakan dalam memenuhi kebutuhan publik baik secara informatif maupun hiburan (Mangan et al., 2020). Studi Andika et al., (2021), YouTube merupakan *platform* media sosial dengan pengguna aktif sebesar dua miliar pengguna yang tersebar di seluruh dunia saat ini.

Citra didefinisikan sebagai persepsi seseorang ketika mendengar nama perusahaan, lembaga, pemerintahan maupun organisasi mengenai berbagai fakta, sejarah, peristiwa dan tujuan yang tak terbatas yang bekerja sama untuk membuat kesan pada publik publik dengan *output* positif maupun negatif (McCoy, 2014). Menurut pandangan Kriyantono (2006) citra merupakan sebuah gambaran

bersifat objektif atas pemikiran yang tercipta pada diri seseorang yang terbentuk melalui kesan positif maupun negatif dari pesan informatif yang diterima. Keterkaitan antara persepsi publik atas citra Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keberlangsungan sebuah pemberitaan pada *platform channel* YouTube KPK memiliki hubungan antara satu sama lain jika dilihat dari prinsip citra yang terbentuk secara kognitif atas keberlangsungan sebuah komunikasi (Susanto, 2020).

Menurut Frank Jefkins (1997) dalam (Soemirat & Ardianto, 2012), citra terbagi dalam berbagai konsep landasan sebagai upaya menerapkan sebuah persepsi seseorang yang efektif bagi organisasi, lembaga, perusahaan dan individu, di antaranya: (1) *Current image* atau citra sesungguhnya merupakan gambaran yang muncul secara natural dalam ranah publik eksternal mengenai persepsi seseorang tentang sebuah organisasi, lembaga, perusahaan dan individu; (2) *Mirror image* atau cerminan dari citra yakni praduga sementara sebuah organisasi, lembaga, perusahaan dan individu atas persepsi yang dihasilkan seseorang dalam citra yang telah dihasilkan; (3) *Wish Image* atau citra yang diinginkan memiliki pengertian sebagai tujuan yang diinginkan sesuai visi dan misi sebuah organisasi, lembaga, perusahaan dan individu atas persepsi seseorang.

Dari konsep landasan tersebut, Susanto (2020) berpendapat jika lembaga KPK ikut serta dalam menerapkan kebijakan membentuk persepsi citra positif di kalangan masyarakat, sebab KPK merupakan lembaga yang memperjuangkan antikorupsi di Indonesia, sehingga pemahaman dari konsep landasan citra yang telah dikemukakan Frank Jefkins (1997) berkaitan dengan lembaga KPK itu sendiri.

Untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari pembentukan citra lembaga KPK yang diasumsikan publik dari pengaruh yang dihasilkan atas pemberitaan mengenai pemberhentian 57 pegawai KPK pada 15 September 2021 melalui *platform* YouTube KPK RI, konsep Nimpoeno (1985) dapat digunakan sebagai pengukuran untuk mengetahui pembentukan citra lembaga KPK menurut pandangan seseorang dalam pengaruh yang dihasilkan pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK pada 15 September 2021 melalui *platform* YouTube KPK sebagaimana uraian berikut :

(1) *Perception* (Persepsi) dalam proses pembentukan citra dari pandangan sebuah pemberitaan, pemaknaan dari kejadian yang diperoleh dari perspektif seseorang atas rangsangan yang dihasilkan mampu membentuk citra bagi konteks yang ditujukan. Pada konsep ini berfokus pada rangsangan opini pribadi seseorang atas *feedback* yang dihasilkan dari suatu kejadian atau permasalahan yang telah dihadapi suatu lembaga, pemerintah, perusahaan dan organisasi. Untuk itu kejujuran seseorang merupakan hal penting sebagai upaya dalam mengetahui persepsi tertentu yang dihasilkan seseorang.

(2) *Cognition* (Kognisi), merupakan pemahaman secara signifikan dari keyakinan yang dirasakan atas rangsangan pribadi seseorang dari *feedback* yang dihasilkan pada sebuah kejadian atau permasalahan yang melibatkan konteks yang ditujukan. Keyakinan yang dihasilkan dalam mengambil keputusan mengenai sebuah kejadian merupakan salah satu faktor penting dalam mengetahui makna seseorang dalam membentuk citra pada konteks yang melibatkan sebuah lembaga, pemerintah, perusahaan dan organisasi.

(3) *Attitude* (Sikap), pemaknaan dalam konteks sikap merupakan upaya dalam mengetahui dorongan tertentu bagi seseorang atas pemaknaan yang diterima, seperti melakukan tindakan tertentu yang mampu menghasilkan dampak positif maupun negatif bagi citra pada konteks sebuah lembaga, pemerintah, perusahaan dan organisasi. Sikap tersebut berkaitan dengan gagasan serta ide seseorang yang akan dituangkan dalam kegiatan tertentu baik saat berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun saat bermedia sosial.

(4) *Connation* (Kecenderungan untuk melakukan tindakan) pada konsep ini menitikberatkan perilaku khalayak dalam memaknai suatu objek yang dapat menghasilkan sebuah tindakan. Aspek *connation* menjadi tolak ukur bagaimana seseorang berperilaku dalam merespons objek permasalahan yang ada. Hal tersebut tentunya cukup krusial, sebab berkaitan erat dengan tindakan yang akan dilakukan atau diasumsikan khalayak yang akan mempengaruhi citra positif maupun negatif dari sebuah objek tertentu.

Pegawai. Menurut Widjaja (1993) pegawai merupakan seseorang yang bekerja dengan memanfaatkan pikiran dan fisik dalam sebuah organisasi atau perusahaan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan jabatan tertentu guna memperoleh imbalan berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Seorang pegawai akan berkontribusi untuk merealisasikan suatu kegiatan ke arah tujuan yang telah ditentukan dari sebuah perusahaan (Mangkunegara & Octorend, 2018). Suatu organisasi atau perusahaan pada dasarnya sangat kental dengan keterlibatan manusia dalam mengoptimalkan kegiatan guna mencapai tujuan serta visi misi

organisasi atau perusahaan. Menurut Lubis & Hardi (2015) kinerja seorang pegawai menjadi aspek krusial dan sangat diperlukan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan sebagai upaya merealisasikan tujuan tertentu yang harus dicapai demi kemajuan perusahaan maupun kemajuan pembangunan suatu bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis eksplanatif dengan paradigma positivism. Studi Lundgren et al., (2020) mendefinisikan metode kuantitatif jenis eksplanatif dengan paradigma positivisme sebagai pendekatan yang menerapkan pemikiran ilmiah secara universal, sebagai pengetahuan dasar mengenai sebab akibat yang akan terjadi dari topik sebuah penelitian dengan tahapan olah data secara statistika dalam menghasilkan *output* analisis antar variabel terbentuk.

Tahapan memperoleh hasil penelitian, difokuskan secara keseluruhan pada populasi anggota Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan total keseluruhan sebanyak 96 anggota aktif yang diketahui dari hasil observasi lapangan. Populasi tersebut ditetapkan sebab organisasi mahasiswa dari lembaga tersebut, berkaitan dengan unsur pengetahuan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menghasilkan perspektif tersendiri bagi mahasiswa atas pengaruh pemberitaan pegawai KPK terhadap citra lembaga didasari pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Dari populasi sebanyak 96 anggota tersebut, ditetapkan sebagai responden dengan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dengan presisi *margin of error* 5% (0,05) dengan tingkatan kepercayaan sebesar 95%. Adapun ketentuan penarikan sampel dapat diketahui sebagaimana rumusan berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{96}{1 + 96 (0,05)^2} = \frac{96}{1,24} = 77,4$$

Keterangan:

N = Populasi keseluruhan sampel

n = Sampel minimal

e = Toleransi kesalahan (*Margin of error*)

Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin menghasilkan 77,4 dibulatkan menjadi 80 sampel. Dari 80 sampel tersebut, ditetapkan sebagai responden atas dasar pemahaman dari *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2015) teknik *simple random sampling* merupakan sebuah keputusan dalam menentukan jumlah sampel dengan memberikan peluang sama terhadap jumlah populasi yang akan dipilih menjadi responden secara acak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner melalui Google Form dengan pengukuran skala likert 5 poin, dokumentasi, dan kajian pustaka, serta penelusuran melalui internet guna mendapatkan informasi dan data yang relevan. Pembentukan kuesioner dilakukan secara terstruktur dengan menghubungkan tiap variabel, sehingga menghasilkan dimensi serta indikator yang mampu mewakili pernyataan dari tiap variabel terbentuk pada sebuah penelitian (Malhotra & Birks, 2015). Pembentukan kuesioner secara terstruktur dapat diketahui sebagaimana penjelasan pada tabel operasionalisasi variabel berikut ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel X Pemberitaan Pemberhentian	<i>Background</i> (Latar belakang)	1. <i>Up to date</i> mengikuti topik pemberitaan 2. Membandingkan isi pesan dengan pesan lainnya 3. Selalu mencari pemberitaan bersifat kredibel	Skala Likert
	<i>Statement</i> (Pernyataan)	1. Bersikap netral terhadap sebuah pemberitaan 2. Merasa kesal dengan berita yang disajikan	

57 Pegawai KPK		3. Selektif dalam mendukung berita yang disajikan	
(R. E. Lundgren & Mcmakin, 2018)	<i>Verify the accuracy</i> (Memverifikasi akurasi)	1. Mudah terprovokasi terhadap suatu berita 2. Mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial 3. Melibatkan asumsi pribadi terkait pemberitaan	
Variabel Y Citra KPK (Nimpoeno, 1985)	<i>Perception</i> (Persepsi)	1. Kritis dalam memahami permasalahan suatu lembaga 2. Netral terhadap permasalahan suatu lembaga 3. Tidak peduli atas kejadian yang melibatkan suatu lembaga	
	<i>Cognition</i> (Kognisi)	1. Memiliki opini atas permasalahan suatu lembaga 2. Mencari sumber relevan terkait permasalahan suatu lembaga 3. Berpihak atas faktor ajakan kerabat maupun keluarga	
	<i>Attitude</i> (Sikap)	1. Selalu membagikan informasi atas opini pribadi 2. Mengutamakan opini pribadi dibandingkan pendapat orang lain 3. Sering berkomentar melalui media sosial	
	<i>Connation</i> (Kecenderungan untuk melakukan tindakan)	1. Memiliki ketertarikan pada suatu objek permasalahan 2. Membagikan konten yang dirasa bermanfaat 3. Pandangan mengenai opini yang dihasilkan media sosial terkait sebuah objek	

Terdapat dua variabel terbentuk dengan uraian dimensi serta indikator yang mampu mewakili pernyataan tiap variabel yakni Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK (Variabel X) dan Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (Variabel Y). Setelah mengetahui kestrukturannya yang terbentuk dari operasionalisasi variabel sebagai acuan pembentukan kuesioner, maka hipotesis penelitian diperlukan sebagai praduga sementara atas perolehan hasil penelitian yang dapat diketahui sebagaimana penjelasan berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK terhadap Citra Lembaga
 H_0 : Tidak terdapat pengaruh Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK terhadap Citra Lembaga

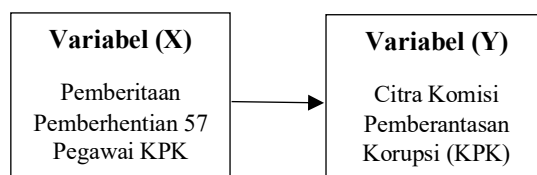
Berdasarkan perumusan hipotesis penelitian yang telah diasumsikan, diformulasikan ke dalam hipotesis statistik guna mengetahui dugaan sementara parameter populasi atas konteks pembahasan penelitian saat ini dan dapat diketahui sebagaimana uraian perumusan berikut :

$H_0: \beta \leq 0$ (Regresi tak berarti)
 $H_1: \beta > 0$ (Regresi berarti)

Keterangan :

H_0 = Hipotesis Nol

β = Koefisien regresi populasi yang menyatakan pengaruh antar variabel



Setelah menyusun langkah terstruktur dalam rancangan penelitian, tahap selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data berupa Uji Konfirmasi Data dan Analisis Data menggunakan *software* IBM SPSS versi 2.6 guna memperoleh hasil penelitian saat ini. Uji Konfirmasi Data diperlukan untuk

mengetahui kebasahan serta tingkat konsisten dari perolehan hasil kuesioner yang terbentuk dengan *output* pengolahan data dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Sujarweni, 2014). Analisis Data diperlukan dalam tahap pemrosesan hasil kuesioner sebagai upaya memperoleh hasil hipotesis terbentuk dengan *output* dan perolehan hasil yang dapat diuraikan dengan Teknik Uji Analisis Linear Sederhana dengan ketentuan hasil dari Uji F, Uji t dan Uji Koefisien Determinasi (Gupta et al., 2020).

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas menjadi tahap awal dalam olahan data hasil kuesioner guna memperoleh hasil penelitian lebih lanjut. Teknik *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) menjadi tolak ukur dari Uji Validitas dengan ketentuan apabila perolehan nilai KMO lebih besar dari 0,50 serta nilai probabilitas Sig. *Bartlett's Test* lebih rendah dari 0,05 maka Uji Validitas dapat dikatakan valid. Tingkat keakuratan Uji Validitas juga diperkuat kembali dengan mengetahui *output Anti-Image Correlation* sebagai tolak ukur mengetahui korelasi parsial tiap indikator variabel dengan asumsi keputusan *output Anti-Image Correlation* lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan indikator instrumen penelitian mampu mencerminkan variabel terbentuk (Singarimbun & Sofian, 1989). Perolehan hasil Uji Validitas dapat diketahui sebagaimana rekapitulasi hasil pada tabel 3 di bawah :

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	KMO MSA	Sig. Bartlett's Test	Anti-Image Correlation Tertinggi	Anti-Image Correlation Terendah
X	0,879	0,828	0,942 ^a	0,514 ^a
Y	0,808	0,803	0,899 ^a	0,550 ^a

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Dari rekapitulasi hasil Uji Validitas di atas terdapat *output* KMO MSA dengan perolehan 0,879 pada variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK) dan 0,808 untuk variabel Y (Citra KPK) yang artinya lebih besar dari 0,50 sebagai asumsi keputusan valid dari *output* KMO MSA. Selain itu nilai probabilitas Sig. *Bartlett's Test* pada tiap variabel menghasilkan nilai sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,05. Perolehan hasil dari *output Anti-Image Correlation* juga mempertegas kembali Uji Validitas guna menguji korelasi secara parsial pada tiap indikator terbentuk dengan hasil tertinggi sebesar 0,942^a dan terendah 0,514^a pada variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK). Sedangkan variabel Y (Citra KPK) memperoleh hasil tertinggi sebesar 0,899^a dan terendah 0,550^a. Dari keseluruhan *output Anti-Image Correlation* pada tiap variabel terbentuk, telah memenuhi asumsi keputusan valid sebab lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan jika indikator pada instrumen penelitian mampu mencerminkan setiap variabel terbentuk.

Tahap selanjutnya dalam memperoleh hasil pengolahan data kuesioner penelitian saat ini akan dilakukan Uji Reliabilitas untuk mengetahui konsistensi keakuratan pada tiap item instrumen kuesioner terbentuk dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan asumsi keputusan apabila perolehan hasil indikator yang terbentuk lebih besar dari 0,60. Perolehan hasil Uji Reliabilitas dapat diketahui sebagaimana rekapitulasi hasil pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
X	0,828	0,985	26
Y	0,803	0,805	23

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Perolehan hasil Uji Reliabilitas pada keterangan Tabel 4 dapat dinyatakan reliabel sebab *output Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yakni 0,828 pada variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK), sedangkan variabel Y (Citra KPK) memperoleh hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,803. Dengan demikian tiap butir pernyataan yang telah tersusun sedemikian rupa pada instrumen penelitian mampu mengidentifikasi pernyataan secara akurat dari aspek karakteristik serta sifat dan memiliki tingkat konsistensi mumpuni sebagai indikator penelitian saat ini.

Setelah mengetahui secara signifikan hasil Uji Konfirmasi data, selanjutnya dilakukan Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov yang merupakan bagian dari Uji Asumsi Klasik guna mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau sebaliknya dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai probabilitas Sig. lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal sehingga penelitian saat ini mampu menghasilkan model regresi yang baik dengan memiliki data nilai residual yang berdistribusi normal. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov dan dapat diketahui sebagaimana uraian pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,77970326
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,046
	Negative	-0,079
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Berdasarkan hasil dari Uji Normalitas pada Tabel 5 diketahui jika nilai probabilitas Sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data pada penelitian saat ini memiliki nilai residual yang berdistribusi normal sehingga mampu menghasilkan model regresi yang baik. Tahap selanjutnya dalam proses penelitian saat ini adalah Analisis Regresi Linier Sederhana. Perolehan hasil awal dari teknik Analisis Regresi Linier Sederhana adalah Uji F sebagai cara untuk mengetahui secara statistika apakah teknik analisis model regresi mampu digunakan untuk memprediksi pengaruh yang terjadi antara variabel terbentuk. Adapun asumsi syarat keputusan dari Uji F adalah apabila nilai probabilitas Sig. harus lebih rendah dari 0,05 sehingga dapat dikatakan valid. Perolehan hasil Uji F dapat diketahui sebagaimana uraian Tabel 6.

Tabel 6. Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2598,751	1	2598,751	112,313	,000 ^b
Residual	1804,799	78	23,138		
Total	4403,550	79			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Dari Tabel 6 dapat diketahui jika hasil Uji F dinyatakan valid sebab memperoleh probabilitas Sig. sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,05 serta terdapat nilai F_{hitung} yakni 112,313. Perolehan hasil Uji F tersebut dapat dikatakan valid sehingga teknik analisis model regresi mampu digunakan dalam memprediksi hipotesis praduga sementara penelitian terkait pengaruh pemberitaan pemberhentian 57 Pegawai KPK terhadap citra lembaga KPK.

Tahap selanjutnya setelah mengetahui perolehan hasil dari Uji F akan dilakukan Uji t yang merupakan langkah lanjutan dari Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana guna mengidentifikasi hipotesis praduga sementara yang telah diasumsikan. Adapun syarat keputusan valid dari Uji t apabila nilai probabilitas Sig. lebih rendah dari 0,05 serta t_{hitung} lebih tinggi dari t_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Perolehan hasil Uji t dapat diketahui sebagaimana rekapitulasi pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,241	4,695		6,867	0,000
Variabel X	0,529	0,050	0,768	10,598	0,000

Dependent Variabel : Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Hasil Uji t pada Tabel 7 berfokus pada nilai probabilitas Sig. 0,000 yang lebih besar dari 0,05 serta hasil dari t_{hitung} yakni 6,867 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,990 yang diketahui dari hasil distribusi t_{tabel} . Hasil tersebut secara signifikan dapat dikatakan valid, sehingga hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak sebab telah memenuhi asumsi keputusan valid Uji t sehingga hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK terhadap Citra Lembaga.

Selain mengetahui secara signifikan perolehan hasil hipotesis praduga sementara, terdapat keterangan lebih lanjut dari Uji t yang berfokus pada *output* secara parsial antara variabel terbentuk dengan mengetahui nilai constant (a) 32,241 sebagai persamaan nilai regresi. Adapun hasil koefisien regresi (b) 0,529 variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK). Untuk mengetahui secara signifikan hasil tersebut dapat diinterpretasi lebih lanjut dengan perumusan berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 32,241 + 0,529X$$

Dari perumusan tersebut jika terdapat pengaruh Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK terhadap Citra Lembaga sebesar 32,241 apabila tidak mengalami perubahan pada tiap variabel terbentuk secara positif maupun negatif. Sedangkan hasil dari koefisien regresi (b) 0,529 mewakili pengaruh secara simultan dengan peningkatan pengaruh sebesar 1% apabila terdapat peningkatan positif pada variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK). Pengaruh yang dihasilkan tersebut juga akan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (Citra KPK) sebesar 0,529.

Tahap akhir dalam proses Analisis Regresi Linier Sederhana adalah Uji Koefisien Determinasi guna mengetahui pengaruh hasil hipotesis penelitian saat ini dalam bentuk persentase dengan menitikberatkan output nominal *R Square*. Jika hasil *R Square* semakin tinggi besaran pengaruh yang telah diasumsikan pada hipotesis praduga jika akan meningkat begitu pula sebaliknya. Uji Koefisien Determinasi penelitian dapat diketahui sebagaimana uraian Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,768 ^a	0,590	0,585	4,810

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2022)

Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan jika terdapat nilai *R Square* sebesar 0,590. Perolehan tersebut dapat diasumsikan bahwa Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK cukup berpengaruh terhadap Citra Lembaga KPK sebesar 59%. Dengan demikian masih terdapat pengaruh lain di luar variabel X (Pemberitaan Pemberhentian 57 Pegawai KPK) yang diteliti sebesar 41% (100-59) yang mampu mempengaruhi lebih lanjut variabel Y (Citra KPK). Pengaruh lain di luar variabel X dapat diasumsikan berhubungan dengan kinerja pihak KPK dalam memberantas korupsi serta isu maupun informasi yang akan terus berdatangan dan diterima oleh pihak KPK seiring dengan berjalannya waktu.

Dari serangkaian hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa pemberitaan pemberhentian

pegawai KPK pada media sosial YouTube cukup berpengaruh terhadap Citra Lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dimensi pada pemberitaan yang terdiri dari Latar belakang, pernyataan, memverifikasi akurasi yang dikemukakan oleh (R. E. Lundgren & McMakin, 2018) cukup mendukung penelitian ini, namun ada faktor lain yang tidak diteliti mempengaruhi penelitian ini. Faktor lain tersebut seperti berita yang berkembang di media online, dan media sosial terkait pemberhentian pegawai menimbulkan opini positif maupun negatif terkait dengan pemberitaan pegawai dari masyarakat.

Denis McQuail (1981) dalam Rohim (2009) pendekatan publik dan pengaruhnya terhadap pemberitaan yang optimal, mencakup berbagai aspek aktual dari fenomena proses penerimaan pesan dari sebuah media dalam lingkup komunikasi massa. Pendekatan tersebut didasari oleh oposisi tertentu akan asumsi sebuah pesan yang diterima, keinginan untuk lepas dari perdebatan di kalangan sosial yang didasari oleh selera atau keberpihakan pemberitaan, penggunaan dan kebutuhan seseorang dalam menggunakan media, sehingga pemberitaan pada sebuah *platform* media sosial, disebabkan KPK merupakan lembaga politik yang kredibel, sehingga fenomena disinformasi politik, bias media serta rendahnya publik dalam mencari sumber kredibel pemberitaan menjadi salah satu faktor tertentu dalam mempengaruhi persepsi publik atas pandangan tertentu terhadap citra lembaga KPK (Suwana, 2020).

Jika mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Lundgren & McMakin (2018) dalam mengukur serta memahami sebuah pemberitaan pada penelitian saat ini dapat dipahami berdasarkan tiga aspek faktual, yakni latar belakang, pernyataan dan memverifikasi akurasi pemberitaan. Apabila dianalisis berdasarkan aspek tersebut, latar belakang dari isi sebuah pemberitaan merupakan aspek pertama yang akan dikaji dalam mengukur serta memahami sebuah pemberitaan. Latar belakang dari isi pemberitaan pemberhentian pegawai KPK pada media sosial YouTube dapat dinyatakan mampu menarik perhatian khalayak yang dipengaruhi oleh antusias dalam mengikuti secara faktual berita terkini terkait pemberitaan. Dengan demikian latar belakang dari pemberitaan mengenai pemberhentian pegawai KPK dapat dikatakan jelas dan mampu untuk dikaji lebih dalam.

Aspek selanjutnya adalah pernyataan atas tanggapan yang diasumsikan seseorang. Jika dilihat dari hasil penelitian saat ini mengenai pemberitaan pemberhentian pegawai KPK pada media sosial YouTube, khalayak cenderung berasumsi bahwa berita yang berkembang menimbulkan opini kurang baik. Hal tersebut sejalan dengan studi Trisnanda (2021) yang menyatakan bahwa kegiatan TWK bagi para pegawai KPK bersifat tidak logis dan tidak profesional, sehingga wajar jika KPK akan mendapatkan opini kurang baik maupun pandangan negatif dari berbagai pihak. Selain itu (Prasetyo et al., 2021) menegaskan kembali jika kebijakan TWK hanya bertujuan untuk melakukan pemberhentian terhadap para pegawai KPK dan secara jelas bertentangan dengan hukum karena tidak diatur secara *expressive verbis* pada UU No. 19 Tahun 2019 ataupun PP No. 41 Tahun 2020, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVIII/2019 dan tidak memenuhi esensi hukum.

Adanya opini kurang baik dari sebuah pemberitaan, Regina E. Lundgren dan Andrea H. McMakin berpendapat bahwa hal tersebut mampu mempengaruhi sisi positif dari apa yang diasumsikan khalayak atas pendapat berbeda tentang risiko, krisis komunikasi serta keputusan konsensus yang diinformasikan oleh banyak orang sehingga dapat berpotensi kepada para pemangku kepentingan.

Memverifikasi akurasi pemberitaan merupakan aspek terakhir dalam mengukur serta memahami sebuah pemberitaan. Jika dilihat dari studi hasil saat ini, pemberhentian 57 pegawai KPK yang ditampilkan pada media sosial YouTube dapat dikatakan kurang detail sehingga membuat khalayak merasa bingung serta ambigu. Mengukur serta memahami sebuah pemberitaan merupakan aspek paling utama sebagai langkah untuk memperkuat pernyataan yang telah diasumsikan pada aspek sebelumnya yakni *statement* atau pernyataan. Dengan demikian pemberitaan pemberhentian pegawai KPK pada media sosial YouTube masih terbilang ambigu dan perlu penjelasan lebih detail terkait konteks pembahasan. Terlebih temuan Khatami & Kurnia (2022) menyatakan bahwa fenomena disinformasi politik serta fenomena isu pemberhentian 57 pegawai KPK yang bersifat ambigu dalam menengahi persoalan KPK dipengaruhi oleh tidak adanya kehadiran pejabat atau politis yang berkomentar lantang sebagai *opinion leaders*, sehingga memberikan dampak cukup signifikan terkait komputasi pendapat, pandangan, sikap serta emosi yang mengarah pada distribusi sentimen positif dan negatif atas bias media dari kebijakan proses TWK yang telah diselenggarakan BKN.

Di sisi lain, pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK pada media sosial YouTube dapat dikatakan cukup negatif sebab khalayak cenderung menitikberatkan ketidaksetujuan keputusan yang diambil pihak lembaga, terkait kebijakan TWK yang telah dilaksanakan para pegawai KPK. Secara garis besar, pemberitaan pemberhentian Pegawai KPK pada media sosial YouTube mampu menarik

perhatian masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh media sosial sebagai media aktif yang mampu membuat khalayak tertuju menggunakannya secara terus menerus, terlebih dengan adanya berita menarik maupun fenomena isu yang tersebar mampu meningkatkan perhatian khalayak (Zarrell, 2010). Disisi lain tanggapan khalayak atas berita berkembang pada *platform* YouTube terkait pemberhentian pegawai menimbulkan opini yang kurang baik.

Pada konteks tersebut secara tidak langsung sesuai dengan pernyataan (McLuhan & Fiore, 1967) yang berpendapat bahwasanya khalayak akan selalu memiliki keterkaitan cukup signifikan terhadap media yang secara sadar atau tidak sadar media mampu memberikan tanggapan positif maupun negatif atas pola informasi yang disajikan. Sejatinya, pemberhentian 57 pegawai KPK dilakukan di tengah gencarnya upaya pencegahan korupsi dan hal tersebut menjadi salah satu polemik tersendiri bagi khalayak yang mampu mempengaruhi citra dari lembaga itu sendiri.

Pernyataan khalayak yang tidak mendukung pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK menjadi salah satu *feedback* dominan atas polemik yang dihasilkan dari pemberitaan tersebut. Selain itu, para pegawai KPK menilai kebijakan proses TWK yang diselenggarakan BKN dianggap memiliki masalah tertentu. Sehingga para pegawai KPK melaporkan kejanggalaan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia serta mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Usaha para pegawai KPK tersebut tidak membuahkan hasil sehingga keputusan penetapan pemberhentian dengan hormat pada 57 pegawai KPK telah disahkan pada 30 September 2021 (Rosok et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaruh pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK melalui media YouTube cukup berpengaruh terhadap citra KPK. sehingga teori terkait pemberitaan yang dikemukakan oleh (R. E. Lundgren & McMakin, 2018) terdiri latar belakang, pernyataan, memverifikasi akurasi, terhadap citra Lembaga KPK cukup mendukung penelitian.

Temuan dalam penelitian adalah opini yang timbul dari masyarakat terkait pemberitaan pemberhentian 57 pegawai KPK dapat dijadikan dalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan konsep atau teori dan teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R., Kao, C. T., Williams, C., Lee, Y. J., Alweis, R., Andika, R., Kao, C. T., Williams, C., & Lee, Y. J. (2021). YouTube as a source of information on the COVID-19 pandemic. *Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives*, 11(1), 39–41. <https://doi.org/10.1080/20009666.2020.1837412>
- Baron, D. P. (2005). Competing for the public through the news media. *Journal of Economics and Management Strategy*, 14(2), 339–376. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2005.00044.x>
- Boczkowski, P. J., Matassi, M., & Mitchelstein, E. (2018). How young users deal with multiple platforms: The role of meaning-making in social media repertoires. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(5), 245–259. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmy012>
- Carlina, G., & Paramita, S. (2017). PR Crisis Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i1.211>
- Chandra, E. (2018). Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(2), 406. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.1035>
- Chano, T. M., & Paramita, S. (2019). Transformasi Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Instagram (Studi terhadap Akun @karyaadalahdoa). *Koneksi*, 3(1), 176. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6201>
- Effendy, O. U. (2009). *Komunikasi teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Gupta, B. C., Guttman, I., & Jayalath, K. P. (2020). *Simple Linear Regression Analysis* (2nd ed.).
- Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022a). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitte : Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *February*. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i1.449>
- Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022b). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Riset Komunikasi*,

- 5(1). <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i1.449>
- Kohring, M. (2019). Public Trust in News Media. In *The International Encyclopedia of Journalism Studies*. <https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0056>
- Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana. In Prenada Group.
- Lubis, N., & Hardi. (2015). Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. *Pustaka Setia Bandung*, 14(1).
- Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2018). *Risk Communication A Handbook for Communicating Environmental, Safety, and Health Risks, Sixth Edition*.
- Lundgren, S., Elebro, J., Heby, M., Nodin, B., Leandersson, K., Micke, P., Jirström, K., & Mezheyski, A. (2020). Quantitative, qualitative and spatial analysis of lymphocyte infiltration in periampullary and pancreatic adenocarcinoma. *International Journal of Cancer*, 146(12), 3461–3473. <https://doi.org/10.1002/ijc.32945>
- Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2015). *Marketing Approach: An Applied Approach*.
- Mangan, M. S., Cakir, A., Yurttaser Ocak, S., Tekcan, H., Balci, S., & Ozelik Kose, A. (2020). Analysis of the quality, reliability, and popularity of information on strabismus on YouTube. *Strabismus*, 28(4), 175–180. <https://doi.org/10.1080/09273972.2020.1836002>
- Mangkunegara, A. P., & Octorend, T. R. (2018). Effect of Work Discipline, Work Motivation and Job Satisfaction on Employee Organizational Commitment in the Company (Case Study in PT. Dada Indonesia). *Universal Journal of Management*, 3(8), 318–328. <https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030803>
- McCoy, M. (2014). Reputational Threat and Image Repair Strategies: Northern Ireland Water's Crisis Communication in a Freeze/Thaw Incident. *Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing*, 26(2), 99–126. <https://doi.org/10.1080/10495142.2013.872508>
- McLuhan, M., & Fiore, Q. (1967). The Medium is the Message: An Inventory of Effects. In *Gingko Press* (Vol. 1).
- Nasrullah, R. (2016). Teori dan riset media siber (cybermedia). In *Kencana Prenada Media* (Vol. 8, Issue 5).
- Nimpoeno, J. S. (1985). *Kepribadian dan Perubahannya*. Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, D. E., Surabaya, U. N., & Hukum, F. (2021). *Problem Yuridis Pemecatan Pegawai KPK*. July.
- Rangkuti, A. I. E. (2021). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK*.
- Rosok, G. D. G., Paliligan, T., & Pondang, A. (2022). *Analisis Hukum Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara*.
- Ruben, B. D. (2017). Between Communication and Information. In *Between Communication and Information*. <https://doi.org/10.4324/9781351294720>
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK : Suatu Kajian Doktrinal (The Legal Basis and Impact of the KPK 's National Insight Test : A Doctrinal Study). *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September 2020), 201–208. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.740>
- Singarimbun, M., & Sofian, E. (1989). Metode Penelitian Survei. *Jakarta: PT Pustaka LP3ES*.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2012). Dasar-dasar public relation. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Pustaka baru Press.
- Suryawati, I. (2011). Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek. *Ilmu Komunikasi*.
- Susanto, E. (2020). Gagasan Komunikasi Untuk Negeri. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Suwana, F. (2020). What motivates digital image activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information Communication and Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>
- Trisnanda, M. J. F. (2021). Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara. *Jurist-Diction*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24300>

- Umam, A. K., & Head, B. (2020). Testing the Limits of Public Integrity: The Impact of Vested Interests and Countervailing Forces on Indonesia's KPK. *Asian Politics and Policy*, 12(3), 384–403. <https://doi.org/10.1111/aspp.12548>
- Widjaja, A. (1993). Administrasi Kearsipan: Suatu Pengantar. In *Administrasi Kearsipan*.
- Zarrell, D. (2010). The Social Media Marketing Book. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI.